

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara berkembang. Seiring dengan perkembangan, perekonomian terus semakin maju. Teknologi semakin canggih dan kebutuhan semakin meningkat. Pembangunan nasional juga harus ada kemajuan. Dalam rangka pembangunan, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak. Pajak merupakan hak pungutan resmi pemerintah berdasarkan Undang-Undang.

Pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut membantu pemerintah dalam pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor.

Pada saat ini , seiring dengan harga kendaraan bermotor yang semakin terjangkau, daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat. Masyarakat seringkali berpendapat memiliki satu kendaraan bermotor saja tidak cukup . Hal ini berdampak kepada meningkatnya volume kendaraan yang bisa menyebabkan kemacetan. Kemacetan mungkin terjadi

karena luas jalan yang tidak mampu lagi menampung jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak.

Dengan semakin tingginya tingkat kemacetan, pemerintah mulai melirik permasalahan ini dengan membuat kebijakan memberlakukan tarif pajak progresif . Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dengan kebijakan ini, pemilik kendaraan membayar pajak lebih tinggi untuk memiliki kendaraan kedua dan selanjutnya. Selain akan mengurangi kemacetan tarif pajak progresif akan menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah.

Akan tetapi permasalahan akan timbul apabila pemberlakuan tarif pajak progresif ini tidak terealisasi dengan baik. Karena banyak yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Pemilik kendaraan bermotor harus membayar nominal lebih banyak di sebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak di kuasai lagi. Hal ini sering terjadi karena warga telah menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga di kenakan pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak di kuasanya lagi.

. Namun Masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui apa itu tarif pajak progresif atau wajib pajak justru tidak merasakan perbedaan yang signifikan terhadap kenaikan tarif pajak karna tarif pajak progresif tersebut sehingga memungkinkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tidak lah berkurang. Sehingga tujuan pemberlakuan tarif pajak progresif tidak sepenuhnya dapat dirasakan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul “ANALISIS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENEKANAN VOLUME KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PADANG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Padang?
2. Apakah penerapan tarif pajak progresif di Kota Padang dapat menekan volume kendaraan?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Padang?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak
2. Untuk mengetahui bahwa penerapan tarif pajak progresif dapat mengurangi volume kendaraan yang menyebabkan kemacetan
3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan penerapan tarif pajak progresif
4. Untuk menetapkan solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan tarif pajak progresif

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi wajib pajak

Menambah pengetahuan wajib pajak tentang diberlakukannya tarif pajak progresif dan menimbulkan kesadaran wajib pajak akan tingginya tarif pajak jika wajib pajak semakin banyak membeli kendaraan bermotor

2. Bagi masyarakat

Masyarakat akan mengetahui sejauh mana penerapan tarif pajak progresif dapat menekan volume kendaraan. Dengan adanya kesadaran akan tarif pajak progresif masyarakat akan lebih tertarik menggunakan kendaraan umum. Selain lebih ekonomis, kemacetan akan ikut berkurang.

3. Bagi pemerintah

Pemerintah dapat menilai apakah telah berhasil diterapkannya tarif pajak progresif. Pemerintah juga dapat menilai hal yang perlu diperbaiki agar pemberlakuan tarif pajak progresif efektif. Serta dapat menentukan langkah agar pemberlakuan tarif pajak progresif dapat secara langsung dirasakan manfaatnya. Serta pemerintah dapat mengetahui sejauh mana tarif pajak progresif meningkatkan pendapatan Negara.

